

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Kabupaten Bandung merupakan sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Pusat pemerintahan dan ibu kotanya Soreang. Luas wilayah keseluruhan Kabupaten Bandung sebesar 1.762,39 Km² dengan batas-batas wilayah administratif sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung dan Kabupaten Sumedang
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Garut
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Garut dan Kabupaten Cianjur
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Cianjur dan Bandung Barat
- Bagian Tengah berbatasan dengan Kota Bandung dan Kota Cimahi
Sebagian besar wilayah Kabupaten Bandung merupakan wilayah pegunungan.

Kabupaten Bandung dikenal sebagai pusat pariwisata di Jawa Barat. Tercatat ada 19 objek wisata unggulan yang bisa menjadi magnet bagi para turis, baik domestik maupun asing yang berkunjung ke Kabupaten Bandung.

Kabupaten Bandung memiliki 31 Kecamatan dan 10 Kelurahan yang didominasi pada usia 15-64 tahun dimana pada usia tersebut produktif dalam bekerja. Berikut ini data dari BPS Kabupaten Bandung (2016) terkait jumlah penduduk sebagai berikut :

**Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Bandung
berdasarkan kelompok umur tahun 2016**

Jenis Kelamin	0-14 (Muda)	15-64 (Produktif)	65+ (Tua)	Jumlah
Laki-laki	534.006	1.217.227	72.475	1.823.708
Perempuan	530.820	1.162.184	79.911	1.772.915
Jumlah	1.064.826	2.379.411	152.386	3.596.623
%	29,60	66,15	4,23	

(Sumber : Data diolah, Badan Pusat Statistik Kab. Bandung 2017)

Berdasarkan Tabel 1.1 jumlah penduduk usia produktif mencapai 66,15% yang hampir mendominasi keseluruhan penduduk di Kabupaten Bandung.

1.2 Latar Belakang Penelitian

Pada era konsumtif seperti sekarang ini membuat manusia semakin menjadi tidak rasional dalam membeli kebutuhannya sehingga mempengaruhi kondisi keuangannya. Banyak hal yang mempengaruhi manusia untuk melakukan pembelian yang impulsif, tanpa ada pertimbangan ke depan. Hal ini didukung dengan pusat perbelanjaan yang tersebar luas dan telah tersedia secara *online* yang memberikan akses lebih mudah kepada konsumen dalam pemenuhan kebutuhannya. Masyarakat sebaiknya memiliki pengetahuan keuangan serta *skill* untuk mengelola sumber daya keuangan secara efektif dengan tujuan mencapai kesejahteraan, yang mana diartikan sebagai *Financial Literacy* (Lusardi and Mitchel, 2007).

Pentingnya literasi dan inklusi keuangan dikemukakan oleh Atkinson dan Messy (2013) bahwa inklusi dan literasi keuangan merupakan pilar yang sangat berperan penting dalam memperkuat layanan jasa keuangan. Salah satu kendala yang dihadapi oleh masyarakat pada umumnya untuk mengakses sektor jasa keuangan adalah kurangnya pengetahuan dan informasi ataupun dikarenakan masih mahalnya produk dan layanan yang tersedia. Layanan jasa keuangan mempunyai peran penting dalam usaha meningkatkan kesejahteraan

masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Literasi keuangan merupakan investasi jangka panjang. Literasi tidak hanya bermanfaat bagi perlindungan konsumen tetapi juga bermanfaat bagi lembaga keuangan. Karena ketika masyarakat paham dengan produk industri keuangan mereka akan terdorong membeli salah satu produknya.

Menurut Huston (2010 : 307 - 308), Literasi keuangan adalah komponen sumber daya manusia yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan keuangan. Literasi keuangan memiliki tujuan jangka panjang bagi seluruh golongan masyarakat, yaitu meningkatkan literasi seseorang yang sebelumnya *less literate* menjadi *well literate* dan meningkatkan jumlah pengguna produk dan layanan jasa keuangan. Untuk meningkatkan literasi keuangan di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memetakan sasaran edukasi menjadi mahasiswa, perempuan atau ibu rumah tangga, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) atau profesional, dan pensiunan.

Global Financial Development Report (2014) mendefinisikan *Financial Inclusion* sebagai suatu keadaan di mana mayoritas individu dapat memanfaatkan jasa keuangan yang tersedia serta meminimalisir adanya kelompok individu yang belum sadar akan manfaat akses keuangan melalui akses yang telah tersedia tanpa biaya yang tinggi.

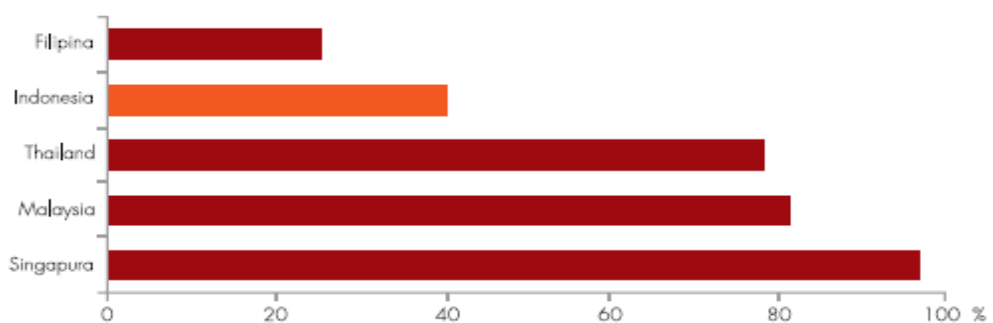
Survei Nasional Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Indonesia yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di 2016 menunjukkan tingkat inklusi keuangan sebesar 67,82% dan tingkat literasi keuangan 29,66%. Berikut data literasi keuangan dan inklusi keuangan pada berbagai industri keuangan di Indonesia pada tahun 2016 :



Gambar 1.1 Grafik Tingkat Literasi dan Tingkat Inklusi Berbagai Industri Keuangan di Indonesia Tahun 2016
(Sumber : Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2016)

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa industri perbankan memiliki tingkat literasi keuangan dan inklusi keuangan paling tinggi diantara industri keuangan yang lain yaitu sebesar 28,90% dan 63,60%, dan industri pasar modal menempati urutan terendah yaitu sebesar 4,40 % dan 1,30%. Dapat disimpulkan bahwa penggunaan produk keuangan di Indonesia masih belum merata pada setiap sektor jasa keuangan. *Forum organization for economic co-operation development (OECD)* menetapkan bahwa untuk memperkuat sistem keuangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat diperlukan integrasi antara inklusi keuangan, literasi keuangan dan perlindungan konsumen. Inklusi keuangan dan literasi keuangan telah menjadi program pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Asosiasi Lembaga Jasa Keuangan yang memiliki tujuan untuk mendorong sistem keuangan yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan agar target indeks inklusi keuangan yang dicanangkan pemerintah melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) sebesar 75% dapat tercapai pada tahun 2019.

Minimnya tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia menyebabkan Indonesia berada pada posisi rendah dibandingkan 4 anggota negara ASEAN (Indonesia, Thailand, Malaysia dan Singapura). Berdasarkan data dari Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia (MPSJKI) OJK Tahun 2015-2019 akses masyarakat Indonesia terhadap keuangan formal dibandingkan beberapa negara ASEAN lainnya, adalah sebagai berikut:



Gambar 1.2 Grafik Akses Masyarakat Terhadap Keuangan Formal
(Sumber: MPSJKI OJK 2015-2019)

Berdasarkan Gambar 1.2 tingkat akses masyarakat Indonesia masih jauh tertinggal dari negara-negara lain di lingkungan ASEAN. Singapura sebesar 96%, Malaysia 81% dan Thailand 78%. Kurangnya akses masyarakat Indonesia terhadap keuangan formal menyebabkan tingkat inklusi keuangan Indonesia menempati urutan kedua terendah di antara negara ASEAN khususnya di bawah Singapura, Malaysia, dan Thailand. Hal tersebut disebabkan oleh sebagian masyarakat Indonesia masih mengandalkan lembaga non keuangan sebagai sumber pendanaan. Populasi Indonesia merupakan populasi yang terbesar keempat di dunia dan terbesar di ASEAN, sampai dua dekade yang akan datang jumlah penduduk yang besar ini akan didominasi oleh usia produktif yang mencapai 70% dari jumlah penduduk. Besarnya penduduk usia produktif yang semakin terpelajar dan melek teknologi merupakan modal untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan (MPSJKI OJK, 2015-2019).

Survei yang dilakukan Global Findex (2014) menunjukkan bahwa jumlah penduduk dewasa, khususnya usia produktif di atas 15 tahun yang mempunyai akun di berbagai macam lembaga keuangan hanya sebesar 35,90%. Hal tersebut menandakan akses masyarakat Indonesia terhadap layanan keuangan masih relatif rendah, oleh karena itu OJK menargetkan penduduk usia produktif (15-64 tahun) yang melek literasi keuangan bertambah menjadi 3,1 juta jiwa hingga akhir tahun 2015. Jumlah itu setara dengan 2% dari jumlah populasi penduduk usia produktif sebanyak 157 juta jiwa. Hal tersebut menjadi target yang ditetapkan OJK guna meningkatkan literasi keuangan (swa.co.id, 2015)

Pada tahun 2016 OJK mencatat bahwa menurut survey, hanya 28,90% penduduk dewasa memahami produk-produk perbankan Indonesia, angka tersebut jauh dari target pemerintah untuk meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia sebesar 75% pada tahun 2019 (elshinta.com diakses 3 November 2017). Untuk mencapai target inklusi keuangan 75% pada 2019, pemerintah telah menyiapkan lima pilar pendukung, yaitu edukasi keuangan, hak properti masyarakat, fasilitas intermediasi, dan saluran distribusi keuangan, layanan

keuangan pada sektor pemerintah, dan perlindungan konsumen (Investor Daily, 22 Mei 2017).

Penduduk usia produktif menurut para ahli adalah penduduk pada kelompok usia antara 15 hingga 64 tahun. Seseorang masuk dalam usia produktif jika sudah melebihi batasan minimum umur yang ditentukan dan tidak melewati batas maksimum umurnya. Orang-orang yang masih dapat bekerja dengan baik untuk menghasilkan suatu produk dan jasa, dan masih terikat kontrak pekerjaan pada suatu perusahaan dapat dikatakan dia adalah usia produktif.

Menurut OJK (2015a:39) masyarakat usia produktif seharusnya berusaha menyisihkan penghasilan untuk kesejahteraan di masa depan ketika mereka pensiun, namun seringkali mereka lupa bahwa masa yang paling menantang adalah ketika mereka memasuki masa pensiun nanti, di mana mereka sudah tidak lagi memiliki penghasilan tetap untuk memenuhi berbagai kebutuhan di masa tua yang tidak kalah besar dibanding pada saat mereka masih berusia produktif, seperti biaya hidup dan juga biaya kesehatan.

Berdasarkan Laporan Kinerja OJK tahun 2012-2017, OJK bersama industri jasa keuangan dan pemerintah melakukan beberapa program strategis di antaranya melalui, program Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai), program Asuransi Mikro, Sosialisasi dan Edukasi Pasar Modal Terpadu, penyelenggaraan Keuangan Syariah Fair, dan penerbitan Roadmap SJK Syariah. OJK juga berperan aktif mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dengan menginisiasi berbagai macam program antara lain program transformasi BPD, pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di 45 Provinsi/Kabupaten/Kota, pendirian gerai PELAKU yang didirikan 14 Gerai yang ada di kantor OJK di daerah sebagai sarana penyampaian informasi keuangan, dan penanganan pengaduan serta peningkatan akses keuangan khususnya sektor UMKM.

Program-program yang telah direncanakan dan diimplementasikan sampai saat ini belum memiliki dampak yang signifikan karena berdasarkan Gambar

1.2 tingkat literasi dan tingkat inklusi di Indonesia masih berada di bawah jika dibandingkan dengan 5 negara ASEAN, terutama Singapore yang sudah mencapai 90% (harian nasional, 2017). Hal inilah yang harus menjadi perhatian serius bagi OJK agar dapat bekerjasama dengan pihak-pihak yang terkait lainnya, salah satunya adalah dengan modal sosial.

Modal sosial memiliki peran yang sangat penting pada beberapa kelompok masyarakat dalam berbagai aktivitas. Fukuyama (2001) mengatakan bahwa modal sosial dibangun oleh kepercayaan-kepercayaan antar individu. Rasa saling percaya dibentuk dalam waktu yang tidak sebentar serta memerlukan proses-proses sosial yang berliku. Burf dalam Agus Supriono dkk (2009 : 3) mendefinisikan modal sosial sebagai kemampuan masyarakat untuk melakukan asosiasi (berhubungan) satu sama lain dan selanjutnya menjadi kekuatan yang sangat penting, bukan hanya bagi kekuatan ekonomi tetapi juga pada setiap aspek eksistensi sosial yang lain. Bongomin et.al (2016) dalam penelitiannya menemukan bahwa modal sosial sangat berperan penting dalam memediasi hubungan antara literasi keuangan dan inklusi keuangan, terutama dalam mengakses layanan keuangan di masyarakat. Kakumba dan Natamba (2013) dalam penelitiannya menemukan bahwa modal sosial dapat memediasi masyarakat untuk dapat mengakses ke layanan keuangan. Salah satu modal sosial yang dapat membantu meningkatkan literasi keuangan dan inklusi keuangan adalah kelompok usia produktif.

Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Bandung (2017) jumlah penduduk usia produktif di Kabupaten Bandung tahun 2016 mencapai 66,15% dari populasi penduduknya, **Hal tersebut dikarenakan Kabupaten Bandung menjadi salah satu tujuan pelajar dan mahasiswa dalam menuntut ilmu.** Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Bandung (2016), menunjukkan bahwa rasio ketergantungan (*dependency ratio*) pada tahun 2016 sebesar 51,15%, yang berarti dari 100 jiwa penduduk usia produktif di Kabupaten Bandung harus menanggung 51 jiwa penduduk non-produktif. Semakin tinggi *dependency ratio* menunjukkan bahwa semakin tingginya beban yang harus ditanggung usia produktif terhadap keberlangsungan hidup usia yang belum

produktif dan yang akan non-produktif, maka sangat dikhawatirkan khususnya dalam beberapa tahun kedepan usia produktif akan menanggung beban yang besar apalagi jika mereka tidak bisa meninggalkan sikap boros dan menghambur-hamburkan uang.

Chen dan Volpe (1998) mengatakan bahwa mayoritas dari usia muda memiliki tingkat literasi yang rendah karena mereka sedang berada dalam tahap yang awal pada kehidupan finansial mereka, pada tahap ini mereka memiliki masalah keuangan yang berkaitan dengan pengetahuan keuangan mereka yang minim, sehingga sebagian besar pendapatan mereka dihabiskan untuk konsumsi daripada investasi. Masyarakat dengan usia muda identik dengan hura-hura dan terkesan tidak mampu mengelola keuangan mereka dengan baik. Pengeluaran pada generasi muda umumnya dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal. Global Youth Survey mengemukakan bahwa 43% generasi muda dengan rentang usia 15-24 tahun di seluruh dunia melakukan pencarian online untuk mengambil keputusan membeli sebuah produk. Sementara, 40% dari mereka mengambil keputusan berdasarkan dari masukan teman atau keluarga, dan 17% lainnya mengambil keputusan berdasarkan iklan di media. Di negara-negara Asia Tenggara, seperti Indonesia, sebagian besar pengeluaran generasi muda umumnya untuk transportasi, makanan, pergaulan, pakaian, dan rekening telepon (viva.co.id). Dari hasil Global Youth Survey tersebut dapat diketahui bahwa anak muda dalam hal ini belum memikirkan kebutuhan-kebutuhan penting untuk jangka waktu yang pendek maupun panjang, seperti tabungan, asuransi, investasi dan lain sebagainya. Hal ini juga membuktikan bahwa anak muda belum memiliki kemampuan untuk merencanakan keuangan mereka. Dengan perilaku keuangan yang seperti ini akan berdampak negatif terhadap kehidupan mereka dalam jangka pendek maupun panjang. Seiring dengan terjadinya perubahan perekonomian dan globalisasi, terjadi perubahan dalam perilaku membeli pada masyarakat. Terkadang seseorang membeli sesuatu bukan didasarkan pada kebutuhan sebenarnya, melainkan dilakukan semata-mata demi kesenangan, sehingga

menyebabkan seseorang menjadi boros yang dikenal dengan istilah perilaku konsumtif atau konsumerisme (Wahyudi, 2013)

Di Bandung terdapat modal sosial yang telah dibentuk oleh OJK untuk meningkatkan literasi keuangan dan inklusi keuangan masyarakat yaitu program edukasi literasi keuangan dengan menggunakan fasilitas Si Mobil Literasi Keuangan (SiMOLEK) (tribunnews.com, 2014). Modal sosial lainnya yaitu terdapat di Jawa Barat melalui forum zakat infaq shodaqoh (ZIS) yang baru launching tanggal 26 Juli 2017 di Kecamatan Cicurug Sukabumi. Wagub Jabar Deddy Mizwar mengatakan Zakat, Infak, Shadaqah merupakan modal sosial masyarakat yang jadi potensi besar bila digerakkan. Deddy mengatakan, masyarakat merupakan Aktor pembangunan, disamping pemerintah, pengusaha, dan akademisi. Maka penggerakan modal sosial ZIS di kecamatan Cicurug, bisa jadi pilot projects untuk dicontoh (jabar.tribunnews.com diakses tanggal 4 Nopember 2017). Dari program-program diatas, terlihat bahwa sasaraannya pun beragam dan tidak terspesifik. Menurut penulis, kelompok usia produktif yang didominasi oleh usia muda patut diteliti karena tingkat literasi dan inklusi keuangannya masih tergolong rendah, padahal OJK selama ini sudah berupaya dan belum membuahkan hasil. Oleh karena itu, usia produktif perlu menjadi perhatian karena nantinya mereka akan menanggung usia yang belum produktif dan yang akan tidak produktif lagi.

Dengan demikian penulis berharap peran modal sosial menjadi sarana penghubung yang akan mendukung peningkatan literasi dan inklusi pada masyarakat di Kabupaten Bandung, terutama penduduk usia produktif. Dari kajian fenomena-fenomena diatas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai **“Pengaruh Literasi Keuangan terhadap Inklusi Keuangan dengan Modal Sosial sebagai Pemediasi (Survey di masyarakat usia Produktif di Kabupaten Bandung)”**.

1.3 Perumusan Masalah

Minimnya tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia menyebabkan Indonesia berada di posisi rendah dibandingkan 4 anggota negara ASEAN khususnya Thailand, Malaysia, dan Singapura. Oleh karena itu, pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berfokus pada peningkatan literasi dan inklusi keuangan khususnya penduduk yang berusia produktif. Kabupaten Bandung merupakan salah satu kabupaten yang penduduknya didominasi oleh usia produktif yang terkenal dengan tingkat konsumtifnya yang tinggi.

Gaya hidup masyarakat Bandung yang lebih suka menghabiskan uang dibandingkan menabung dan berinvestasi dalam produk jasa keuangan semakin meningkat. Program-program yang telah direncanakan dan diimplementasikan oleh OJK sampai saat ini belum memiliki dampak yang signifikan terhadap peningkatan literasi dan inklusi keuangan. Oleh karena itulah, peran modal sosial dalam meningkatkan literasi keuangan dan inklusi keuangan sangat dibutuhkan terlebih pada usia produktif. Modal sosial nantinya diharapkan akan menjadi mediator dalam peningkatan literasi dan inklusi keuangan, sehingga mampu membantu pemerintah dalam mendukung peningkatan literasi dan inklusi keuangan khususnya pada usia produktif di Kabupaten Bandung.

1.4 Pertanyaan Penelitian

1. Apakah literasi keuangan memiliki pengaruh yang signifikan pada inklusi keuangan?
2. Apakah literasi keuangan memiliki pengaruh yang signifikan pada inklusi keuangan dengan modal sosial sebagai pemediasi?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah literasi keuangan memiliki pengaruh yang signifikan pada inklusi keuangan

2. Untuk mengetahui apakah literasi keuangan memiliki pengaruh yang signifikan pada inklusi keuangan dengan modal sosial sebagai pemediasi

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dan manfaat sebagai berikut:

1.6.2 Aspek Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar dapat menjadi masukan dalam membuat program-program dimasa yang akan datang sehingga dapat meningkatkan literasi keuangan dan inklusi keuangan khususnya di Kabupaten Bandung.

1.6.2 Aspek Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu ekonomi. Dan diharapkan dapat menjadi tambahan informasi bagi para pembaca serta menjadi rujukan bagi peneliti yang akan mengembangkan penelitian sejenis.

1.7 Ruang Lingkup Penelitian

1.7.1 Variabel Penelitian

Variabel independen penelitian ini adalah literasi keuangan, variabel hasilnya adalah inklusi keuangan, dan variabel mediasinya adalah modal sosial. Pertanyaan dalam variabel penelitian ini disesuaikan dengan keadaan objek penelitian.

1.7.2 Lokasi dan Objek Penelitian

Lokasi penelitian berada di Kabupaten Bandung, sedangkan objek penelitiannya adalah usia produktif di Kabupaten Bandung.

1.8 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang Gambaran objek penelitian, latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian dan sistematika dari penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA DAN LINGKUP PENELITIAN

Bab ini berisikan penjelasan dari literatur penelitian yang berkaitan dengan teori penelitian yang mendukung solusi permasalahan, penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini dipaparkan tentang metode penelitian yang meliputi jenis penelitian yang dilakukan, variabel, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, metode pengumpulan data teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang analisis data yang menitikberatkan pada hasil olahan data sesuai dengan metode yang digunakan. Interpretasi hasil analisis dari objek penelitian sesuai dengan uji statistik yang digunakan.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan kesimpulan dari analisis dan pembahasan dari bab-bab sebelumnya dan saran yang dapat diterapkan oleh perusahaan yang menjadi objek penelitian.